

ANALISIS PENDAPATAN PERUSAHAAN DAERAH (PD) PASAR ANYAR I KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG TAHUN 2010-2012

¹Nym Rusiani Dewi, ²Anjuman Zukhri, ³Kadek Rai Suwena

^{1,2,3}Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

Email:rusiani_dewi@yahoo.com,anjuman.zukhri@yahoo.com,Kadek_Suwena@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat ketercapaian pendapatan PD Pasar Anyar I tahun 2010-2012, (2) tingkat penurunan pendapatan PD Pasar Anyar I tahun 2012 serta (3) upaya meningkatkan pendapatan PD Pasar Anyar I tahun 2013. Subyek dalam penelitian ini yaitu PD Pasar Anyar I dan obyek dalam penelitian ini pendapatan PD Pasar Anyar I tahun 2010-2012. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tahun 2010-2012 bahwa; (1) penyebab ketidaktercapaian pendapatan tahun 2010-2012 dikarenakan kurangnya sosialisasi PD Pasar Anyar dan pelanggaran yang dilakukan pedagang, (2) penyebab menurunnya pendapatan tahun 2012 dikarenakan harga tidak stabil dan pelanggaran pedagang, 3) upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan yaitu melaksanakan rapat evaluasi internal yang lebih intensif dan memberlakukan surat peringatan.

Kata kunci : Pendapatan, Perusahaan Daerah (PD), Pasar

Abstract

This research is a descriptive was aimed to find out (1) the level achievement income of Regional Company Anyar Market in 2010-2012, (2) rate of decreased income of Regional Company Anyar Market I in 2012, and (3) efforts to increased the income of Anyar Market I in 2013. Subject in this study was Regional Company Anyar Market I and object was income of Regional Company Anyar Market in 2010-2012. The data were collected by documentation and interview. The data obtained was descriptive data analysis with a quantitative approach. The result showed the Regional Company Anyar Market I Buleleng district, Buleleng regency in 2010-2012 that: 1) the reason not achievement of income in 2010-2012 was undercommunication regional company and fouled merchant, 2) the reason decreased income in 2012 was the unstable price and fouled merchant, 3) efforts were made to increase the income was more intensive internal evaluation meeting and carry out memorandum.

Keywords: Income, Regional Company, Market

PENDAHULUAN

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Buleleng adalah bagian dari Pemerintah Daerah yang berdasarkan SK Bupati No.370 tahun 2004 bertugas mengelola beberapa unit pasar milik Pemerintah Kabupaten Buleleng tentang penyerahan asset. PD Pasar Anyar I Kabupaten Buleleng merupakan salah satu unit Perusahaan Daerah Kabupaten Buleleng yang mengelola aset pasar.

Pasar Anyar I Kabupaten Buleleng itu sendiri merupakan salah satu dari tiga pasar terbesar di Kabupaten Buleleng selain Pasar Seririt dan Pasar Banyuasri karena terbagi menjadi lima bagian yaitu Bangunan A yang terbagi menjadi lantai satu dan lantai dua dengan jumlah pedagang sebanyak 126 pedagang, bangunan B terdiri dari lantai satu dan lantai dua dengan pedagang sebanyak 120 pedagang, bangunan C terbagi menjadi lantai satu dan lantai dua dengan jumlah pedagang sebanyak 225 pedagang, pelataran sebanyak 143 pedagang dan toko sebanyak 35 pedagang, sehingga jumlah pedagang secara keseluruhan di Pasar Anyar I sebanyak 649 pedagang. Pasar Anyar I Kabupaten Buleleng dikelola oleh 37 karyawan dari PD Pasar yang mengelola pendapatan dari cukai harian, sewa tanah, iuran sampah, iuran mingguan dan Surat Perjanjian. Pasar Anyar I walaupun tercatat sebagai salah satu pasar terbesar di Kabupaten Buleleng tetapi bukan berarti pendapatan yang diterima selalu naik. Hasil pendapatan Pasar Anyar I di Kabupaten Buleleng belum memenuhi target seperti yang diharapkan, tahun 2010-2012 realisasi pendapatan pasar Anyar I tidak selalu memenuhi target, hal ini terlihat dari tahun 2010 persentase realisasi hanya mencapai 92,50%, kemudian di tahun 2011 target dinaikkan dan realisasi mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi tersebut tetap tidak memenuhi target. Tahun 2012 target diturunkan namun pada realisasinya terjadi penurunan sehingga mencapai persentase realisasi 99,18%. Realisasi Pasar Anyar I di Kabupaten Buleleng belum memenuhi target seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari selama tiga tahun anggaran dimulai pada tahun 2010 realisasi yang

dapat dicapai sebesar Rp 856.305.775,00 sedangkan di tahun 2011 realisasi yang dapat dicapai sebesar Rp 1.117.145.800,00 terlihat bahwa perbandingan realisasi pendapatan PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tahun 2010-2011 terdapat kenaikan sebesar Rp. 260.840.025,00.

Perbandingan selanjutnya di tahun 2011 realisasi sebesar Rp 1.117.145.800,00 sedangkan di tahun 2012 realisasi yang dapat dicapai Rp 1.111.387.975,00 Perbandingan realisasi pendapatan PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tahun 2011-2012 terdapat penurunan sebesar Rp. 5.757.825,00.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait target dan realisasi pendapatan serta upaya peningkatan pendapatan PD Pasar Anyar I Kabupaten Buleleng dengan judul penelitian "Analisis Pendapatan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tahun 2010-2012".

Landasan teori dalam penelitian ini adalah: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Mahmudi (2006:121) mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, mendefinisikan PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Herlina Rahman (2005:38) PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah, dapat disimpulkan PAD

adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Abdul Halim (2004:108) upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus berlanjut agar PAD terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan PAD pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi PAD adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah sebagai berikut. 1) PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber berikut. a) Hasil pajak daerah. Undang - undang nomor 33 tahun 2004 mendefinisikan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, hasil pajak daerah ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. b) Retribusi daerah. Undang - undang nomor 33 tahun 2004 mendefinisikan retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. UU No.33 tahun 2004 menjelaskan salah satu sumber PAD selain Pajak dan Retribusi adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan rumah tangga daerah yang relatif cukup besar. Pengelolaan kekayaan milik daerah tersebut berasal dari PD yang

didirikan berdasarkan Undang-Undang yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. d) Lain-lain PAD yang sah. Menurut Halim (2002:69) Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah. 2) Dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 pasal 1:19 tahun 2004). 3) Lain-lain pendapatan. Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.

Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan PD adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan PD “adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah”. Dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut Muh. Bakat, dkk. (2001) ciri-ciri perusahaan daerah adalah sebagai berikut. 1) Didirikan dengan suatu peraturan daerah; 2) Modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali bila ada ketentuan lain berdasarkan undang – undang; 3) Tujuan usaha adalah mencari laba untuk dana pembangunan daerah. 4) Dipimpin oleh suatu direksi yang diatur dalam peraturan pendiriannya. 5) Ada dewan perusahaan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan pemerintah. 6) Kekuasaan tertinggi bukan pada rapat

pemegang saham tetapi dalam beberapa hal pada kepala daerah. Soedargo (dalam Arjungsi, 2011:32) menjelaskan PD dalam menjalankan usahanya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip berikut. 1) Akuntabilitas (*accountability*). Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan pengawas dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham (Pemerintah Daerah) dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan PD dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham (Pemerintah Daerah). Dewan Pengawas bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan daerah sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham (Kepala Daerah) bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan. 2) Pertanggung jawaban (*responsibility*). Prinsip ini menuntut pimpinan dan manajer perusahaan daerah melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan daerah hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan. 3) Keterbukaan (*transparency*). Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara *independent*. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham (Pemerintah Daerah) dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan. 4) Kewajaran (*fairness*). Seluruh karyawan perusahaan daerah harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan daerah akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain.

Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengundangi benturan kepentingan.⁵ Kemandirian (*independency*). Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan daerah agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan daerah yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan. 6) Kualitas Layanan. PD harus memiliki komitmen untuk menyediakan kualitas layanan yang baik bagi konsumen, sehingga dapat memberikan kepuasan layanan yang berupa rasa nyaman dan aman selama menggunakan layanan pasar. Kualitas layanan merupakan inti dari terbentuknya loyalitas pelanggan pasar. 7) Sumber Daya Manusia. PD memiliki komitmen pada keanekaragaman dalam lingkungan kerja yang diwarnai oleh sikap saling percaya dan saling menghormati di mana semua memiliki rasa tanggung jawab atas kinerja dan reputasi perusda. 8) PD hanya akan merekrut, mempekerjakan dan mengembangkan para karyawan hanya atas dasar kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan bagi pekerjaan yang harus dilakukan. PD harus memiliki komitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat.

PD Pasar menurut UU No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang untuk mengelola aset-aset yang dimiliki pasar di masing-masing daerah. Soedargo (dalam Arjungsi, 2011:32) menjelaskan bahwa terdapat empat faktor penentu kenaikan dan penurunan pendapatan PD Pasar sebagai berikut. 1) Faktor jenis dan jumlah pungutan daerah. Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan

semakin besar pula pungutan yang ditarik dari warga masyarakat. 2) Faktor tarif pungutan pasar. Besarnya tarif pungutan yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Jika tarif pungutan pasar yang dikenakan kepada masyarakat tinggi, maka pendapatan akan semakin meningkat. 3) Faktor efektivitas pungutan retribusi daerah. Dalam melaksanakan pungutan pasar, tidak dapat dipisahkan dari kemampuan aparat pelaksana pungutan. Semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah pendapatan daerah.

Menurut Abdul Halim (2002) terdapat dua usaha untuk meningkatkan pendapatan sebagai berikut. 1) Peningkatan secara intensifikasi, yaitu suatu tindakan atau usaha-usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar pendapatan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat dan teliti. Peningkatan pendapatan asli daerah secara intensifikasi dapat dilakukan dengan cara (a) menyusun atau memperbaiki aspek kelembagaan atau organisasi pengelolaan pendapatan, beserta perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, (b) memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pemungutan, (c) peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi pengawasan dan pengendalian yuridis, teknis, dan penatausahaan, (d) peningkatan sumber daya manusia pengelola pendapatan misalnya dengan mengikutsertakan aparaturnya dalam kursus keuangan daerah (KKD) serta program-program pendidikan dan pelatihan tentang keuangan daerah lainnya. 2) Peningkatan secara ekstensifikasi, yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk menggali sumber pendapatan yang baru, namun dalam upaya ekstensifikasi ini tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional, yaitu pemungutan yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk

menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga pelaksanaan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan masyarakat.

Menurut Sukwiaty (2006:94) pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli (konsumen) dengan penjual (produsen) sehingga bisa berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga jual. Syarat-syarat terbentuknya pasar sebagai berikut yaitu, a) adanya penjual, b) adanya pembeli dan c) adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, serta d) terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sukwiaty (2006) menjelaskan fungsi pasar sebagai berikut. 1) Fungsi Distribusi. Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi, dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. 2) Fungsi Pembentukan Harga. Pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. 3) Fungsi Promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan brosur, membagikan sampel, dan lain-lain.

Menurut Azmil Kafrawi (2012) menjelaskan peranan pasar sebagai berikut. 1) Peranan pasar bagi produsen. Sebagai tempat untuk mempromosikan barang, Sebagai tempat untuk menjual hasil produksi, Sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi. 2) Peranan pasar bagi konsumen. Memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan, Sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. 3) Peranan pasar bagi pemerintah. Sebagai penunjang kelancaran pembangunan, Sebagai sumber pendapatan negara.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketercapaian pendapatan PD Pasar Anyar I tahun 2010-2012 yang tidak memenuhi target, pendapatan PD Pasar Anyar I tahun 2012 yang mengalami penurunan dibandingkan pendapatan tahun 2011 serta

upaya meningkatkan pendapatan PD Pasar Anyar I tahun 2013.

METODE

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu berusaha menggambarkan laporan anggaran dan realisasi pada tiga tahun anggaran agar dapat mengetahui tercapai atau tidaknya target serta terjadi tidaknya penurunan atau kenaikan realisasi di tahun tersebut, menganalisis penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan serta upaya untuk meningkatkan pendapatan. Penelitian ini berlokasi di Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Sawo Singaraja. Penentuan lokasi ini didasarkan pada permasalahan yang diangkat peneliti mengingat Pasar Anyar I merupakan salah satu pasar terbesar di Kabupaten Buleleng yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah dan Pasar Anyar I merupakan pasar yang kegiatan perekonomiannya berjalan 24 jam. Subyek dalam penelitian ini adalah PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pendapatan PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tahun 2010-2012. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan target dan realisasi pendapatan PD Pasar tahun 2010-2012 dan kualitatif berupa informasi mengenai penyebab serta upaya dalam meningkatkan pendapatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan dokumentasi dan wawancara. Dokumen dalam penelitian ini berupa laporan target dan realisasi pendapatan PD Pasar Anyar tahun 2010-2012, sedangkan wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab terkait penyebab dan upaya dalam meningkatkan pendapatan PD Pasar Anyar Singaraja. Instrumen penelitian dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur merupakan kombinasi wawancara terpimpin dan tak terpimpin yang menggunakan inti pokok pertanyaan dimana *interviewer* mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan tidak dirumuskan

secara berurutan melainkan berdasarkan situasinya. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain. 1) Pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. 2) Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. 3) Analisis ketercapaian. Analisis ketercapaian dalam penelitian ini yaitu pengukuran dengan rasio efektivitas. Rasio efektivitas digunakan untuk menggambarkan berhasil atau tidaknya institusi dalam mencapai tujuannya, dalam hal ini adalah dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan target pendapatan yang ditetapkan.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% < 90%	Cukup Efektif
60% < 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Mahsun (2006)

4) Penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam hal ini dengan mendeskripsikan hasil yang diperoleh mengenai target dan realisasi pendapatan di tahun bersangkutan, sebab terjadinya perubahan pendapatan serta upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan. 5) Penarikan kesimpulan / verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu tahap akhir mengenai permasalahan target dan realisasi pendapatan selama tiga tahun anggaran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil

Tingkat ketercapaian pendapatan PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng selama tahun 2010-2012. Pendapatan PD Pasar Anyar I bersumber dari cukai harian, sewa tanah, iuran sampah, iuran mingguan dan Surat Perjanjian. Kelima sumber pendapatan tersebut menghasilkan sumber dana bagi pengembangan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng, namun kelima sumber pendapatan tersebut masih mengalami fluktuasi karena selama tiga tahun anggaran pendapatan PD Pasar Anyar I masih terjadi kenaikan dan penurunan pendapatan serta belum mencapai target yang dicanangkan. Pendapatan PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dalam tiga tahun anggaran yaitu tahun 2010-2012 mengalami fluktuasi. Dimulai pada tahun 2010 pendapatan yang diperoleh PD Pasar sebesar Rp 856.305.775,00 atau 92,50% dari target yang dicanangkan. Persentase tersebut diperoleh dengan rasio efektivitas dengan membandingkan target dan realisasi tahun 2010 kemudian dikalikan 100%. Tahun 2011 pendapatan PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng mencapai Rp 1.117.145.800,00 atau 98,37% dari target yang diharapkan. Persentase tersebut diperoleh dengan rasio efektivitas dengan membandingkan target dan realisasi tahun 2011 kemudian dikalikan 100%. Berdasarkan rasio efektivitas, pendapatan tahun 2011 termasuk dalam kategori efektif, namun belum mencapai target yang diharapkan. Tahun 2012 pendapatan PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng mencapai Rp 1.111.387.975,00 atau 99,18% dari target. Persentase tersebut diperoleh dengan rasio efektivitas dengan membandingkan target dan realisasi tahun 2012 kemudian dikalikan 100%. Berdasarkan rasio efektivitas, pendapatan tahun 2012 termasuk dalam kategori efektif namun belum mencapai target yang ditetapkan.

Penurunan pendapatan PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tahun 2012. Pendapatan tahun 2011 mengalami kenaikan dibandingkan

tahun 2010 dengan selisih kenaikan sebesar Rp 260.840.025,00 (30,46%), sedangkan tahun 2012 pendapatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 dengan selisih penurunan sebesar Rp 5.757.825,00 (0,51%). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pasar Anyar I dan sub bidang perbendaharaan mengenai penyebab terjadinya penurunan pendapatan tahun 2012 diperoleh penjelasan sebagai berikut. Penurunan ini disebabkan karena harga barang yang mulai tidak stabil. Ini menjadi salah satu alasan dikarenakan sumber pendapatan terbesar bersumber dari cukai harian. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2012 jumlah pedagang di pelataran sebanyak 143 sedangkan pada bangunan C sebanyak 225. Dua lokasi ini sebagian besar menjual barang yang umumnya sama dengan pedagang lainnya dimana pelataran komoditas yang dijual adalah sayur, ikan dan bumbu-bumbu dapur. Bangunan C lantai dua dengan komoditas daging, sayur dan bumbu dapur. Pada saat harga mulai tidak stabil per hari rata-rata pedagang yang tidak berjualan sebanyak 19 per tempat, dengan jumlah tersebut tentunya pendapatan akan mengalami penurunan apalagi penutupan tempat ini tidak berlangsung hanya satu hari. Penyebab kedua disebabkan oleh perilaku pedagang dimana pedagang yang sudah memiliki tempat memilih pindah ke tempat yang lebih strategis. Pedagang yang umumnya memiliki tempat lebih dari satu adalah di bangunan C. Bangunan C memiliki kapasitas 280 tempat namun hanya terdapat 225 pedagang. Sisa tempat ini ada yang kosong tanpa penyewa sejumlah 20 tempat dan memang ada penyewa tetapi pedagang tersebut tidak berjualan ditempat tersebut. Pedagang yang berpindah ini adalah sebagian besar pedagang buah, sayur dan bumbu dapur. Pedagang berpindah ke pelataran yang lokasinya di pinggir jalan. Hal ini tidak menyalahi aturan, namun para pedagang ini hanya membayar iuran di tempat yang mereka tempati sekarang. Seharusnya para pedagang yang berpindah ini harus membayar iuran sejumlah tempat yang dimiliki walaupun tidak semua tempat digunakan oleh para pedagang.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan PD Pasar Anyar I Tahun 2013 Berbagai permasalahan dalam pendapatan Perusahaan Daerah Pasar Anyar I yaitu permasalahan tidak tercapainya target pendapatan, fluktuasi pendapatan tentunya perlu dicarikan solusi untuk memperbaiki dan meningkatkan pendapatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Pasar Anyar I diungkapkan upaya-upaya yang dilakukan yaitu (1) kebijakan terkait tindak lanjut bagi pedagang yang belum memenuhi kewajibannya secara tepat, dimana pedagang yang berpindah harus membayar iuran sesuai tempat yang dimiliki dengan pendekatan berupa himbauan terlebih dahulu bahwa iuran yang dibayarkan sejumlah tempat yang dimiliki, (2) melaksanakan rapat evaluasi internal yang lebih intensif secara berkala untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah maupun yang akan dilakukan, misal permasalahan dalam sistem pemungutan iuran dimana pelaksanaan pemungutan masih belum optimal serta (3) memberlakukan surat peringatan. Surat peringatan ini berfungsi dalam pemungutan iuran sewa tanah atau tempat. Setiap bulannya masih terdapat pedagang yang belum melunasi sewa tanah tempat yang mereka gunakan. Pada tahun 2012 per bulan rata-rata pedagang yang masih belum melunasi kewajibannya sebanyak 25 pedagang. Surat peringatan ini memiliki tiga tingkatan yaitu tingkat pertama, kedua dan ketiga. Pertama hanya sebatas surat yang dikeluarkan pihak PD Pasar dengan tanda tangan Kepala PD Pasar untuk segera melunasi tagihan sewa tempat, kedua berupa surat yang dikeluarkan pihak PD Pasar dengan tanda tangan Kepala PD Pasar dan teguran langsung kepada pedagang yang bersangkutan serta ketiga berupa pengambilan hak kembali.

Pembahasan

Pendapatan PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dalam tiga tahun anggaran yaitu tahun 2010-2012 mengalami fluktuasi. Dimulai pada tahun 2010 pendapatan yang diperoleh PD Pasar sebesar Rp

856.305.775,00 atau 92,50% dari target yang dicanangkan. Persentase tersebut diperoleh dengan rasio efektivitas dengan membandingkan target dan realisasi tahun 2010 kemudian dikalikan 100%. Tahun 2011 pendapatan PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng mencapai Rp 1.117.145.800,00 atau 98,37% dari target yang diharapkan. Persentase tersebut diperoleh dengan rasio efektivitas dengan membandingkan target dan realisasi tahun 2011 kemudian dikalikan 100%. Berdasarkan rasio efektivitas, pendapatan tahun 2011 termasuk dalam kategori efektif, namun belum mencapai target yang diharapkan. Tahun 2012 pendapatan PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng mencapai Rp 1.111.387.975,00 atau 99,18% dari target. Persentase tersebut diperoleh dengan rasio efektivitas dengan membandingkan target dan realisasi tahun 2012 kemudian dikalikan 100%. Berdasarkan rasio efektivitas, pendapatan tahun 2012 termasuk dalam kategori efektif namun belum mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan pada poin 4.1.1 terkait penyebab tidak tercapainya target selama tiga tahun anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sie Anggaran dan Kepala Pasar Anyar I Kabupaten Buleleng diungkapkan penyebab tingkat ketercapaian pendapatan belum mencapai target yang dicanangkan dikarenakan adanya beberapa penyebab. Penyebab yang dimaksudkan adalah (1) masih kurangnya sosialisasi dari pihak pasar tentang perda kepada masyarakat khususnya para pedagang; (2) sumber pemungutan pendapatan yang belum maksimal dalam hal pelaksanaannya, serta (3) masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan pedagang terkait pemungutan retribusi. Pelanggaran yang dimaksud yaitu pembayaran tempat yang tidak sesuai dengan jumlah tempat yang dimiliki pedagang, terdapat beberapa pedagang yang memiliki tempat baik los maupun pelataran lebih dari satu. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Mahmudi (2006) yang menyatakan bahwa terdapat dua faktor penyebab ketidaktercapaian realisasi

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kemampuan pihak pemerintah dalam pelaksanaan pungutan sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat itu sendiri.

Tahun 2011 pendapatan PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng mencapai Rp 1.117.145.800,00 melebihi pendapatan tahun 2010 dengan selisih kenaikan sebesar Rp 260.840.025,00 (30,46%). Kenaikan dipicu oleh harga barang yang cukup stabil dan pasokan barang yang cukup stabil pula. Stabilitasnya harga dan pasokan barang membuat para pedagang yang sebelumnya menjadi pedagang pasif mulai berangsur menjadi pedagang aktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Tahun 2012 pendapatan PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng mencapai Rp 1.111.387.975,00 dimana pendapatan ini lebih rendah dari pendapatan tahun 2011 dengan selisih penurunan sebesar Rp 5.757.825,00 (0,51%)

Berdasarkan permasalahan pada poin 4.1.2 terkait penyebab terjadinya penurunan pendapatan tahun 2012 dari hasil wawancara dengan Kepala Pasar Anyar I dan sub bidang perbendaharaan, penurunan ini disebabkan karena harga barang yang mulai tidak stabil sehingga para pedagang menjadi pasif yang mengakibatkan pendapatan menurun dan penyebab kedua disebabkan oleh perilaku pedagang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Hal ini sejalan dengan teori dari Soedargo (2006) dimana terdapat dua faktor penentu kenaikan dan penurunan pendapatan. Pertama, faktor jenis layanan dimana semakin banyak jenis layanan yang digunakan masyarakat maka semakin tinggi pula kewajiban yang harus dibayarkan, apabila kewajiban yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan layanan yang digunakan maka akan mempengaruhi jumlah pendapatan pada periode tersebut. Kedua yaitu efektivitas pungutan daerah dimana semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan (SDM) maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan

yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah pendapatan daerah.

Berdasarkan permasalahan pada poin 4.1.3 terkait upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan tahun 2013, dari hasil wawancara dengan kepala Pasar Anyar I diungkapkan upaya-upaya yang dilakukan yaitu; (1) memperbaiki dan memperbaharui perda yang sudah sesuai dengan kondisi sekarang ini dalam hal ini terkait besarnya kewajiban yang harus dibayar pedagang; (2) kebijakan terkait tindak lanjut bagi pedagang yang belum memenuhi kewajibannya secara tepat; (3) melaksanakan rapat evaluasi internal yang lebih intensif secara berkala untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah maupun yang akan dilakukan; serta (4) memberlakukan surat peringatan. Surat peringatan ini berfungsi dalam pemungutan iuran sewa tanah atau tempat. Surat peringatan ini memiliki tiga tingkatan yaitu tingkat pertama, kedua dan ketiga. Pertama hanya sebatas surat yang dikeluarkan pihak PD Pasar dengan tanda tangan Kepala PD Pasar untuk segera melunasi tagihan sewa tempat, kedua berupa surat yang dikeluarkan pihak PD Pasar dengan tanda tangan Kepala PD Pasar dan teguran langsung kepada pedagang yang bersangkutan serta ketiga berupa pengambilan hak kembali. Hal ini sejalan dengan teori dari Abdul Halim (2002) dimana terdapat dua usaha peningkatan pendapatan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan secara intensifikasi, yaitu suatu tindakan atau usaha-usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar pendapatan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat dan teliti. Peningkatan pendapatan asli daerah secara intensifikasi dapat dilakukan dengan cara (a) menyusun atau memperbaiki aspek kelembagaan atau organisasi pengelolaan pendapatan, beserta perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang; (b) memperbaiki atau menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pemungutan; (c) peningkatan pengawasan dan

pengendalian yang meliputi pengawasan dan pengendalian yuridis, teknis, dan penatausahaan; (d) peningkatan sumber daya manusia pengelola pendapatan misalnya dengan mengikutsertakan aparaturnya dalam kursus keuangan daerah (KKD) serta program-program pendidikan dan pelatihan tentang keuangan daerah lainnya. Peningkatan secara ekstensifikasi, yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk menggali sumber pendapatan yang baru, namun dalam upaya ekstensifikasi ini tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional, yaitu pemungutan yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga pelaksanaan agar tidak memberatkan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penyebab tidak tercapainya target pendapatan pada PD Pasar Anyar I Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng secara umum disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi dari pihak pasar tentang perda kepada masyarakat khususnya para pedagang kemudian sumber pemungutan pendapatan yang belum maksimal dalam hal pelaksanaannya serta masih terjadinya pelanggaran yang dilakukan pedagang terkait pemungutan retribusi.

Penyebab terjadinya penurunan pendapatan pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 disebabkan karena harga barang yang mulai tidak stabil dan disebabkan oleh perilaku pedagang dimana pedagang yang sudah memiliki tempat memilih pindah ke tempat yang lebih strategis, hal ini tidak menyalahi aturan, namun para pedagang ini hanya membayar iuran di tempat yang mereka tempati sekarang. Seharusnya para pedagang yang berpindah ini harus membayar iuran sejumlah tempat yang dimiliki walaupun tidak semua tempat digunakan oleh para pedagang.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan PD Pasar Anyar I tahun 2013 antara lain dengan memperbaiki dan memperbaharui perda yang sudah sesuai dengan kondisi sekarang ini, melaksanakan rapat evaluasi internal yang lebih intensif untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah maupun yang akan dilakukan serta memberlakukan surat peringatan. Surat peringatan ini berfungsi dalam pemungutan iuran sewa tanah atau tempat.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka dapat diajukan saran yaitu Kepada pihak pemerintah khususnya Perusahaan Daerah (PD) Pasar antara lain: (1) melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pedagang tentang sumber pendapatan PD Pasar agar masyarakat khususnya pedagang mengetahui dan menyadari bahwa pungutan tersebut digunakan untuk kepentingan daerah dan masyarakat sendiri; (2) pihak PD Pasar diharapkan dapat lebih tegas dalam melakukan pungutan kepada para pedagang khususnya para pedagang yang kurang kesadarannya dalam memenuhi kewajiban di pasar; (3) melakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait pemberlakuan surat peringatan di tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayani,Cipta. 2011.*Analisis Pendapatan Retribusi Pasar Pada Pasar Sentral Makassar*. Skripsi (tidak diterbitkan). Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi.FE UNM.
- Halim,Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim,Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Cetakan kedua. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir*. Universitas

Pendidikan Ganesha Singaraja

Mahmudi.2006. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mahsun,Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:penerbit BPFPE.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung:Alfabeta.

Sukwiyaty,dkk. 2006. *Ekonomi*. Bandung:Yudistira

Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

Sunaryo. 2001. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: Erlangga.

Supriatna,Tjahya. 2003. *Perusahaan Daerah*. Jakarta:Rineka Cipta

Suryani,Irma. 2009. *Analisis Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar di Kabupaten Pekalongan*. Skripsi(tidak diterbitkan). Jurusan Ekonomi Akuntansi,FE Undip.